

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi serta pengetahuan dan informasi yang berkembang dengan pesat. Tuntutan di bidang pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan masih minim dan sulit diperoleh masyarakat Indonesia, terutama dikalangan masyarakat yang kurang mampu serta kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik yang lazimnya disebut penyandang Disabilitas/difable (People with different abilities).

Disabilitas Tuna Daksa adalah orang yang mempunyai kelainan tubuh pada alat gerak yang meliputi tulang, otot persendian, baik dalam struktur maupun fungsinya yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Kondisi ini biasanya terjadi akibat luka, penyakit atau pertumbuhan yang tidak sempurna dengan keterbatasan kaum Disabilitas Tuna Daksa ini akan membatasi ruang gerak dalam lingkungan sekitar, baik di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, aksesibilitas, masyarakat dan lapangan pekerjaan.

Pada dasarnya Negara Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum dimana segala sesuatu telah diatur berdasarkan Undang-Undang RI. Begitupun dalam hal kesejahteraan sosial dan ketenaga kerjaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1997. Pasal 5; menegaskan bahwa penyandang cacat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Mereka juga

mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam aspek penghidupan dan kehidupan. Dalam Pasal 13 UU No.4 Tahun 1997 menyatakan setiap penyandang cacat memiliki kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan. Selanjutnya pada Pasal 14 menyatakan, perusahaan Negara atau swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan memperkerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Adapun langkah-langkah pemerintah di Indonesia salah satunya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menaggulangi permasalahan tersebut. Pertama, pemerintah telah memfasilitasi sarana dan prasarana khususnya dibidang pendidikan yaitu pembangunan Sekolah bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus yakni SLB (Sekolah Luar Biasa) Dimana sekolah ini mengadakan proses kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan tingkat setara SD, SMP dan SMA. Namun ada beberapa permasalahan yang muncul di antaranya faktor kemiskinan dan keadaan lingkungan masyarakat yang memandang dari sisi luar penyandang disabilitas tersebut sehingga upaya dari pemerintah untuk mengsejahterakan masih kurang direspon masyarakat, kemudian setelah siswa menempuh sekolah khusus (SLB) pendidikan sampai dengan selesai. Mereka bingung akan melanjutkan kearah mana, karena diseluruh instansi maupun lapangan pekerjaan sudah menjadikan syarat utama keadaan fisik dengan alasan dapat menghambat kerja dari instansi tersebut. Kedua, Pelayanan

pelatihan kerja yang di khususkan bagi penyandang Disabilitas “Tuna Daksa” masih belum terealisasikan di setiap daerah.

Dalam undang-undang telah menetapkan setiap perusahaan menyediakan tempat bagi penyandang disabilitas 1% (satu persen) dari karyawan perusahaan. Untuk itu di butuhkan satu wadah khusus bagi penyandang disabilitas ini guna untuk mengasah mental, keterampilan serta skill (Balai Latihan Kerja Disabilitas “Tuna Daksa”) sehingga peserta mampu untuk mandiri dan dapat memanajemen diri serta dapat berkerja pada instansi/perusahaan yang berkerja sama sebagai penyaluran tenaga kerja.

Di Kota Gorontalo terdapat Panti Sosial Bina Remaja Teratai Indah yang berlokasi di Kecamatan Buladu, dalam kunjungan langsung ke instansi ini terungkap bahwa panti ini merupakan salah satu infrastruktur Kota Gorontalo yang dapat mengembangkan pontensi Sumber Daya Manusia, di khususkan bagi masyarakat yang kurang mendapat perhatian dalam bidang pendidikan maupun penyaluran tenaga kerja atau dapat mengembangkan usaha mandiri baik pada manusia normal maupun dikhususkan bagi penyandang disabilitas . Namun demikian kondisinya pada saat ini sudah sangat memprihatinkan di mana Panti Sosial Bina Remaja Teratai Indah telah dialihfungsikan menjadi Rumah Sakit Umum Otanaha sehingga fungsi sebelumnya tidak lagi maksimal, baik dari segi fasilitas bangunan, program kegiatan maupun fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan diangkat pemecahan masalahnya dalam perencanaan dan perancangan berdasarkan latar belakang di atas yaitu belum adanya desain khusus yang memenuhi kebutuhan objek rancangan Balai Latihan Kerja Disabilitas Tuna Daksa yang sesuai dengan standar-standar perancangan, baik dalam hal mobilisasi maupun fasilitas penunjang kegiatan bagi penyandang disabilitas tuna daksa dengan pendekatan Behaviour Architecture (Arsitektur Perilaku).

## **C. Tujuan**

Menghasilkan suatu rancangan karya Arsitektur dalam sebuah bentuk desain bangunan yang dapat menampung segala kegiatan bagi kaum Disabilitas, serta dapat memudahkan akses dan pemenuhan kebutuhan maupun pelaksanaan latihan kerja, sehingga tercipta suasana yang aman dan nyaman bagi pengguna dengan pendekatan perilaku (Behaviour Architecture).

## **D. Sasaran Pembahasan**

Berdasarkan tujuan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai meliputi:

Sasaran pembahasan atau langkah-langkah yang akan dicapai dalam perancangan objek balai latihan kerja disabilitas tuna daksa Kota Gorontalo. Pertama mengumpulkan data dengan cara studi deskriptif berupa kunjungan langsung maupun studi komparasi dari sumber dari perancangan yang sudah ada sebelumnya, mengenai objek dan tema yang sejenis dengan objek rancangan balai latihan kerja disabilitas tuna daksa kota Gorontalo. Selanjutnya menganalisis data

sesuai dengan karakteristik lokasi di daerah Gorontalo dan menghasilkan bentuk dasar fisik rancangan berdasarkan studi pustaka dan kajian tema. Kemudian menganalisis kebutuhan konsep makro dan mikro pengguna sebagai output bentuk dengan ukuran-ukuran standar yang di transformasikan dalam bentuk fisik bangunan/desain bangunan balai latihan kerja disabilitas tuna daksa kota Gorontalo.

#### 1. Non Arsitektural

Sebagai sasaran pembahasan dari perancangan, di antaranya:

- a. Mendesain fasilitas pendidikan beserta pelatihan kerja bagi pelaku kegiatan dalam Balai Latihan kerja Disabilitas Tuna Daksa.
- b. Menciptakan suasana aman dan tenang serta keleluasaan bagi para pelaku kegiatan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja dalam bentuk desain gambar dengan pendekatan konsep Behaviour Architecture atau konsep penyesuaian karakter pengguna.
- c. Mendesain sarana dan prasarana yang mampu menampung dan mengkonsentrasikan kegiatan pelatihan khusus untuk penyandang Disabilitas Tuna Daksa.

#### 2. Arsitektural

Secara arsitektural, sasaran pembahasan untuk mendapatkan secara terperinci mengenai hal-hal berikut:

- a. Konsep perancangan makro, meliputi:
  - ✓ Konsep analisa dan pemilihan site.
- b. Konsep perancangan mikro, meliputi:

- ✓ Konsep besaran dan kebutuhan ruang.
  - ✓ Konsep organisasi dan hubungan ruang.
  - ✓ Konsep sirkulasi dalam bangunan.
- c. Konsep sistim struktur.
- d. Konsep sistim utilitas dan perlengkapan bangunan.

### **E. Lingkup Bahasan**

Dari perumusan masalah di atas dapat ditarik sebuah gagasan untuk menciptakan desain suatu sarana yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan dalam Balai Latihan kerja Disabilitas Tuna Daksa Kota Gorontalo dengan pendekatan konsep Behaviour Architecture.

Adapun pembahasan dibatasi pada hal-hal yang bersifat arsitektural dalam perencanaan objek Balai Latihan Kerja Disabilitas Tuna Daksa serta penambahan lain secara garis besar yang berhubungan dengan pembahasan sebagai bahan dasar dan pertimbangan.

Adapun batasan yang diambil sebagai dasar perancangan objek Balai Latihan Kerja Disabilitas Tuna daksa sebagai berikut:

1. Objek yang dirancang adalah Balai Latihan Kerja Disabilitas Tuna Daksa Kota Gorontalo.
2. Terletak di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
3. Perancangan Objek menerapkan Tema Arsitektur Behaviour atau Arsitektur perilaku dengan menggunakan studi banding dengan penerapan tema yang sudah ada.

4. Objek yang direncanakan lebih dikhususkan untuk mewadahi kegiatan Balai Latihan Kerja Disabilitas Tuna Daksa, di mana peserta mengalami kondisi kecacatan Fisik (Tuna Daksa).
5. Untuk pembahasan masalah tanpa data digunakan pendekatan dengan asumsi anggapan.

#### **F. Metode Penulisan**

Dalam tahap pengumpulan informasi, digunakan metode pembahasan deskriptif. Yaitu metode yang memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*Fact Finding*) sebagaimana keadaan yang sebenarnya (Nawawi, H. H. dan Martini, H. M, Penelitian Terapan, Gajah Mada Universitas Press, Hal 73).

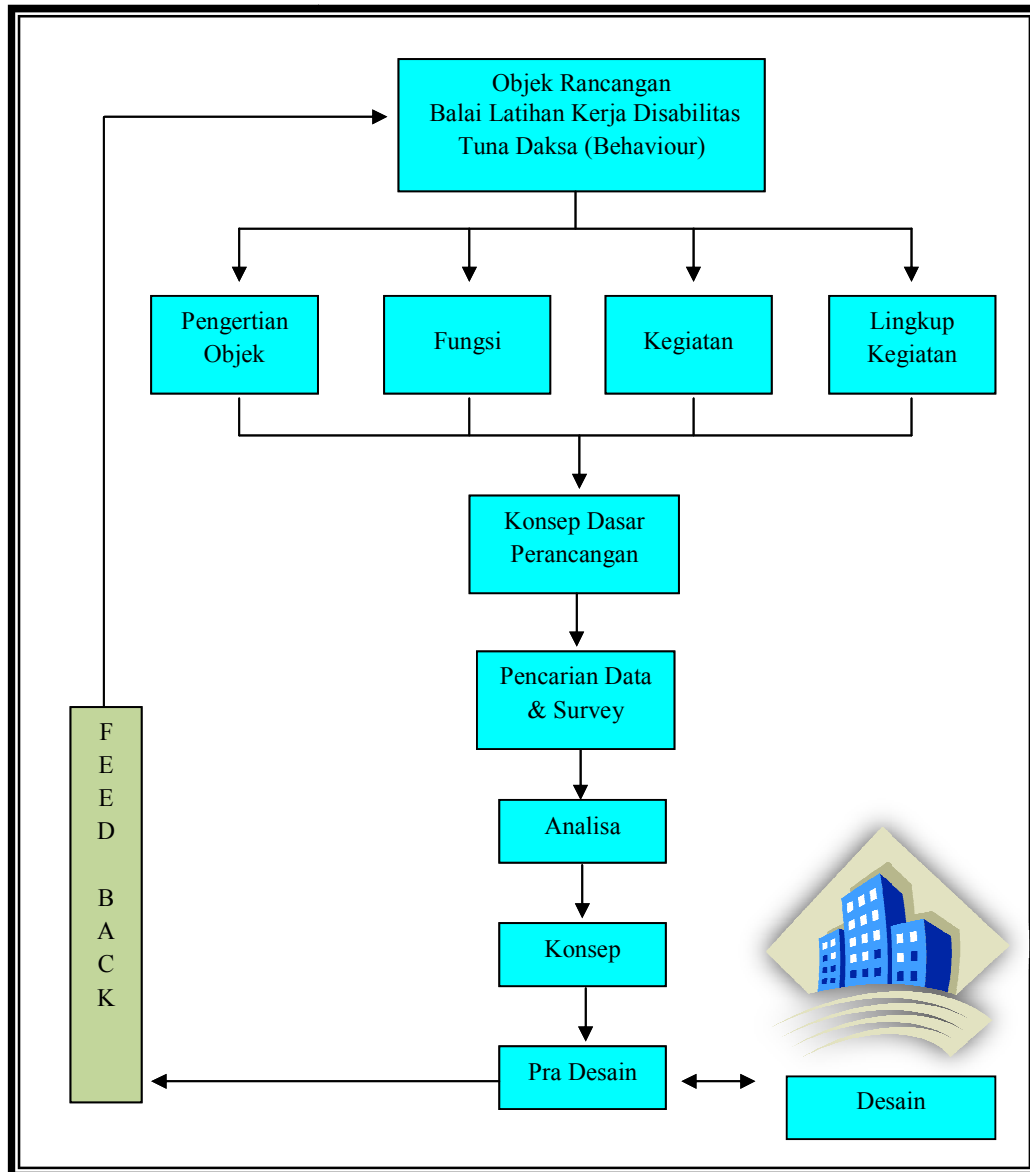
Adapun metode pembahasan dengan cara analisa deskriptif, di antaranya:

1. Dengan cara observasi di lapangan berdasarkan data dan studi literatur yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini dikumpulkan data sebanyak-banyaknya yang difokuskan pada objek rancangan yang dipilih. Selain itu dilakukan pula studi literatur yang menyangkut faktor-faktor teknis dan persyaratan bangunan yang mempengaruhi dan sebaiknya ada pada perencanaan. Selanjutnya keseluruhan data ini dianalisis merangkum hal-hal pokok kemudian dimasukkan dalam komponen pembahasan.
2. Melakukan kunjungan dan wawancara dengan pihak terkait, yaitu mengunjungi instansi yang dianggap berkompeten dalam menangani hal yang berkaitan dengan objek perencanaan, kemudian mewawacarainya. Hasil wawancara inilah yang dapat dijadikan sumber data tambahan.

3. Melakukan studi komparasi yaitu mencari serta mengumpulkan data-data yang berasal dari internet maupun dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap bangunan sejenis yang sudah ada atau bangunan lain yang ada hubungannya dengan objek rancangan. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat diterapkan dalam perencanaan yang menyangkut aspek teknis dan aspek desain pada bangunan Balai Latihan Kerja Disabilitas Tuna Daksa Kota Gorontalo.
4. Mengolah dan menganalisis data yang ada sesuai dengan karakteristik lokasi tapak pada daerah yang sesuai dengan *land use* objek perancangan Balai Latihan Kerja Disabilitas Tuna Daksa Kota Gorontalo.
5. Melakukan Transformasi bentuk fisik bangunan berdasarkan analisa kebutuhan pengguna dalam konsep makro maupun mikro sebagai *out put* desain perancangan.
6. Melakukan *Feed Back* sebagai barometer ketercapaian bentuk desain berdasarkan judul dan tema yang ditentukan.



Adapun secara keseluruhan metode perencanaan yang akan digunakan dalam memperoleh objek desain adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1: Skema Kerangka Acuan perancangan  
Sumber: Data Primer

## **G. Sistematika Penulisan**

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Sasaran Pembahasan, Lingkup Pembahasan, Metode dan Sistematika Penulisan.

### **2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan umum dan tinjauan khusus. Tinjauan umum dimaksudkan untuk mengungkap kerangka acuan komprehensif yang terdiri aspek non fisik berupa; pengertian, fungsi, tujuan dan status proyek. Membahas dan menguraikan program kegiatan dan rencana dari perorangan, badan swasta atau pemerintah yang akan menggunakan/memakai/pemilik gedungnya. Dalam hal ini diuraikan struktur organisasi tergantung dari masing-masing proyek, identifikasi dan sifat kegiatan. Sedangkan tinjauan khusus berisi tinjauan/teori-teori arsitekural yang paling substansial yang digunakan sebagai landasan/acuan dalam program perancangan. Isi/rincian sub bab di bab ini akan bervariasi sesuai dengan judul proyek Tugas Akhir yang secara garis besar memuat hal-hal yang disebutkan diatas.

### **3. BAB III KARAKTERISTIK/GAMBARAN UMUM LOKASI**

Bagian ini memuat karakteristik/gambaran umum lokasi penelitian seperti kondisi geografi, topografi, klimatologi, hidrologi, aspek sosial budaya masyarakat dan lain-lain. Diharapkan data yang diperoleh dapat dijadikan acuan dalam penentuan bentuk dan system struktur yang tentunya didasarkan atas teori

rancangan yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan karakteristik daerah.

#### 4. BAB IV KONSEP DASAR PERENCANAAN

Bab ini berisi pendekatan konsep dasar perencanaan dimaksudkan sebagai langkah untuk transformasi kearah ungkapan fisik perencanaan sebagai upaya untuk memecahkan masalah bagi tuntutan perwujudan fisiknya, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Pendekatan konsep ini dibedakan atas Konsep Dasar Perencanaan Makro sebagai langkah penyelesaian terhadap lokasi/site, kaitannya dengan orientasi bangunan dengan bangunan lainnya dalam hal ini termasuk tata masa dan tata ruang luarnya. Pendekatan Konsep Dasar Perencanaan Mikro sebagai langkah penyelesaian dalam penyusunan program ruang berupa; kabutuan ruang, pola organisasi/hubungan ruang, besaran ruang, bentuk dan penampilan, penentuan system struktur dan material yang digunakan.

#### 5. BAB V KESIMPULAN

Bagian ini memuat pernyataan singkat dan tepat yang dapat dirangkum dari hasil kajian dan pembahasan bab-bab sebelumnya yang berisi asumsi/anggapan dasar serta langkah-langkah yang akan dilakukan terkait dengan pemecahan masalah objek rancangan.